



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagaimana amanah terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PKP diamanahkan untuk menetapkan arah pembangunan penyelarasan perumahan dan pembentukan ekosistem perumahan melalui intervensi sebagai regulator, operator, dan fasilitator pada ekosistem perumahan.

Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi satuan unit kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV maupun pemangku kepentingan, dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan nasional di sektor perumahan dan kawasan permukiman untuk periode lima tahun mendatang.

Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Tahun 2025-2029 memuat kondisi umum dan gambaran wilayah kerja serta capaian dari target kinerja periode sebelumnya yang menjadi masukan dalam menetapkan arah pembangunan untuk lima tahun yang meliputi: visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan pendanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.

Dengan memohon rahmat dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerja sama dan dedikasi dari seluruh jajaran di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV, kami berharap seluruh target sebagaimana ditetapkan di dalam Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV ini dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, demi mendukung dan menyukseskan program Pemerintah dan mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Surabaya, 31 Desember 2025

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Jawa IV



Mustofa Otfan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	22
A. Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	22
B. Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV.....	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	27
A. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi	27
B. Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP JAWA IV.....	33
C. Kerangka Kelembagaan.....	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	44
A. Target Kinerja.....	44
B. Kerangka Pendanaan	46
BAB V PENUTUP	48
LAMPIRAN I: Matrik Kinerja dan Pendanaan BP3KP Jawa IV	53
LAMPIRAN II: Pohon Kinerja BP3KP Jawa IV.....	62
LAMPIRAN III: Metode Perhitungan BP3KP Jawa IV	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Peta Wilayah Kerja BP3KP Jawa IV Provinsi Jawa Timur	3
Gambar 2. 1. Pohon Kinerja BP3KP Jawa IV	25
Gambar 3. 1. Bagan SOTK UPT BP3KP Jawa IV	36
Gambar 3. 2. Struktur Organisasi BP3KP Jawa IV	38
Gambar 3. 3. Peta Jabatan BP3KP Jawa IV, Sumber: BP3KP Jawa IV, 2025.	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah Penduduk Jawa Timur 2025 Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050	4
Tabel 1. 2. Data <i>Backlog</i> Perumahan Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 2025	7
Tabel 1. 3. Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2025	9
Tabel 1. 4. Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Tahun 2020 - 2024	12
Tabel 1. 5. Analisis Potensi dan Permasalahan	18
Tabel 2. 1. Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BP3KP Jawa IV	23
Tabel 3. 1. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan	38
Tabel 3. 2. Pegawai Berdasarkan Golongan	38
Tabel 3. 3. Pegawai Berdasarkan Jabatan	39
Tabel 3. 4. Distribusi PNS dan PPPK BP3KP Jawa IV	39
Tabel 3. 5. Matriks Proyeksi Jumlah Pegawai 2025–2029	41
Tabel 3. 6. Matriks Proyeksi Jabatan 2025–2029	41
Tabel 4. 1. Rekapitulasi Target Kinerja BP3KP Jawa IV 2025-2029	44
Tabel 4. 2. Rekapitulasi Kerangka Pendanaan BP3KP Jawa IV 2025-2029	46



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN JAWA IV
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

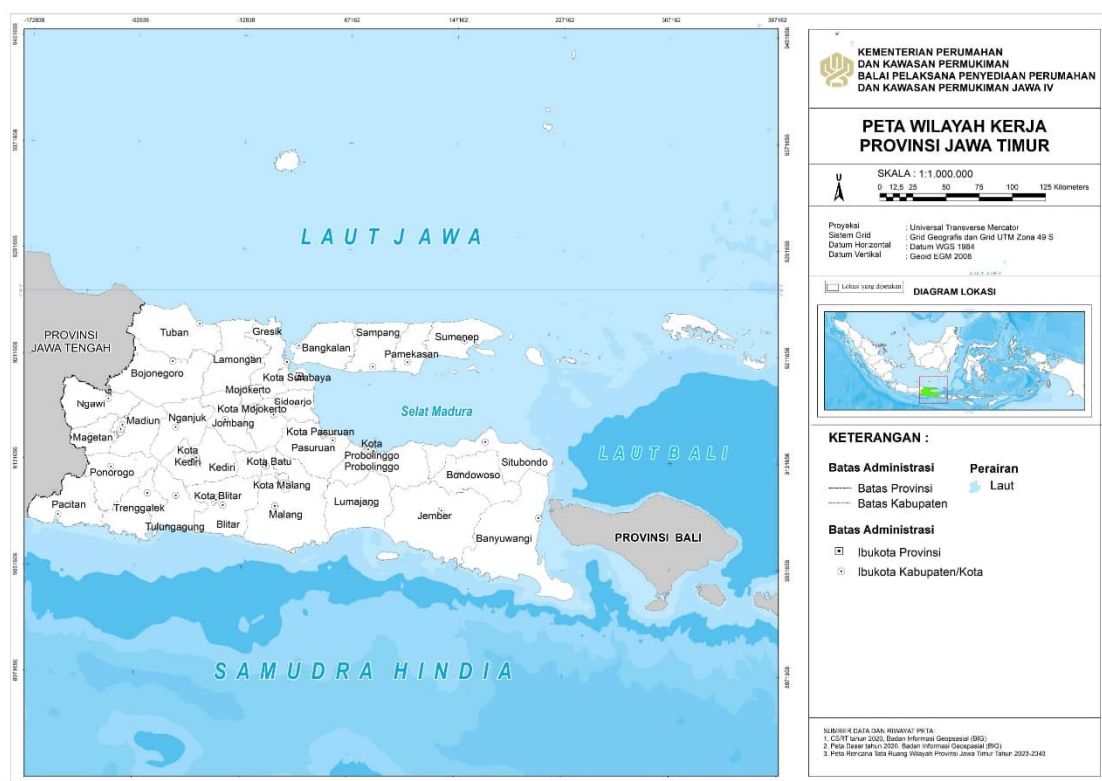
Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Bahkan telah diatur lebih jauh lagi tidak hanya hak tetapi juga kewajiban, bahwa setiap orang wajib menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah memiliki peran yang penting untuk memastikan amanat tersebut dapat terwujud sehingga akses masyarakat terhadap perumahan dapat terjamin.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan bagian dari Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029, ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029, pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan perdesaan. Hal ini menjadi landasan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun Rencana Strategis lima tahun mendatang. Fokus utamanya adalah mendukung pencapaian infrastruktur nasional yang tertuang dalam Indikasi PSN 2025–2029 pada Lampiran III Perpres tersebut, khususnya program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan

Permukiman. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV menjalankan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

Wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV berada di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah sebesar 48.036,84 Km² terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 773 Kelurahan dan 7.721 Desa. Letak astronomis Provinsi Jawa Timur pada 110° 50' 28.520" hingga 116° 28' 17.156" Bujur Timur dan 4° 50' 30.680" hingga 8° 58' 52.699" Lintang Selatan dan wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 287 pulau. Cakupan wilayah kerja BP3KP Jawa IV sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1. Peta Wilayah Kerja BP3KP Jawa IV Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Pulau Jawa. Dinamika laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur mengalami tren kenaikan berdasarkan hasil proyeksi penduduk Jawa Timur 2020-2050, pada tahun 2025

jumlah penduduk Jawa Timur sekitar 42,09 juta jiwa, angka kepadatan penduduk mencapai 876 jiwa/km², sedangkan rasio jenis kelamin sebesar 99,37¹.

Tabel 1. 1. Jumlah Penduduk Jawa Timur 2025 Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050

Indikator	Tahun					
	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Jumlah penduduk (jiwa)	42.089.271	43.279.076	44.145.661	44.669.897	44.860.792	42.089.271

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, diolah

Pertumbuhan ini membawa tantangan besar pada aspek kesejahteraan, mengingat saat ini terdapat sekitar 18.466.847 jiwa penduduk yang berada dalam status kesejahteraan 40% terbawah, dengan konsentrasi populasi rentan terbanyak berada di Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang. Sebaran penduduk saat ini masih terkonsentrasi di kawasan metropolitan dan zona industri, terutama di aglomerasi Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) serta Malang Raya. Sebaliknya, wilayah bagian selatan, tapal kuda, dan kepulauan memiliki kepadatan yang lebih rendah namun menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses layanan dasar serta risiko bencana yang tinggi. Karakteristik wilayah berdasarkan kepadatan seperti kawasan metropolitan, kawasan industri, wilayah agraris perdesaan, kawasan pesisir, serta wilayah rawan bencana tersebut memengaruhi tipologi kebutuhan perumahan dan pendekatan intervensi pembangunan kawasan permukiman serta kebutuhan hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Berdasarkan Data BPS Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025 menunjukkan di Provinsi Jawa Timur distribusi rumah tangga menurut luas lantai menunjukkan bahwa struktur hunian di Jawa Timur didominasi oleh rumah dengan luas 50–99 m² (54,49%), yang mengindikasikan mayoritas rumah tangga telah menempati hunian dengan ukuran relatif memadai sesuai standar rumah sederhana sehat. Kelompok 20–49 m² (14,60%) masih cukup besar, yang umumnya menggambarkan hunian sederhana di kawasan padat perkotaan maupun perdesaan berkembang. Proporsi rumah sangat kecil (≤ 19 m²) relatif rendah (1,46%), namun tetap menjadi indikator kerentanan hunian ekstrem. Sementara itu, rumah dengan luas ≥ 100 m² mencapai 29,45%, mencerminkan keberagaman struktur sosial ekonomi. Secara umum, komposisi ini menunjukkan kondisi hunian yang cenderung stabil dengan dominasi kelas menengah bawah².

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025*, Hal.70.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025*, Hal.226.

Sedangkan tahun 2024 distribusi rumah tangga menurut sumber air minum mencapai angka diatas 90% rumah tangga telah mengakses sumber air minum layak, dengan dominasi air kemasan/isi ulang (37,73%), sumur bor/pompa (24,37%), sumur terlindungi (14,33%) dan leding (9,31%). Tingginya penggunaan air isi ulang diindikasikan sebagai respons terhadap keterbatasan kualitas air tanah atau jaringan perpipaan di wilayah perkotaan. Akses ledeng/PDAM (9,31%) menunjukkan bahwa cakupan layanan perpipaan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target *SDGs*. Keberadaan 2,05% rumah tangga yang masih menggunakan sumber tidak terlindungi menjadi perhatian karena berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat³.

Secara umum distribusi rumah tangga terhadap akses sumber penerangan utama di Provinsi Jawa Timur tahun 2024 hampir mencapai 100% di seluruh Kabupaten/Kota. Akses penerangan utama 99,71% terfasilitasi listrik PLN dan 0,29% listrik non-PLN. Mayoritas daerah telah mencapai cakupan listrik PLN sepenuhnya 100%, sedangkan terdapat disparitas wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep mencatatkan persentase akses listrik PLN terendah di Jawa Timur sebesar 92,57%, dan 7,43% rumah tangga menggunakan listrik non-PLN sebagai alternatif utama⁴.

Keterbatasan lahan serta tingginya harga tanah membatasi penyediaan rumah tapak terjangkau dan meningkatkan kebutuhan hunian vertikal. Struktur penggunaan lahan di Provinsi Jawa Timur saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, baik lahan basah maupun kering, yang mencakup sekitar 43,16% dari total luas wilayah. Selain sektor pertanian, sektor kehutanan memegang peranan penting dengan luas mencapai 28,35% yang sebarannya terkonsentrasi secara merata di bagian selatan Jawa Timur. Sementara itu, seiring dengan pesatnya perkembangan jaringan jalan dan urbanisasi, lahan terbangun kini telah mencakup 12,87% wilayah, dengan konsentrasi pembangunan terbesar berada di Kota Surabaya beserta daerah-daerah penyangganya. Berdasarkan kerangka regulasi RTRW 2023-2043, proporsi pemanfaatan ruang di Jawa Timur telah ditetapkan secara strategis, yakni sebesar 16,54% dialokasikan sebagai kawasan lindung guna menjaga keseimbangan ekosistem, sedangkan 83,46% sisanya diproyeksikan sebagai kawasan budidaya untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah⁵.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025*, Hal.227.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025*, Hal.230.

⁵ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045*.

Provinsi Jawa Timur didominasi wilayah perdesaan dengan total 7.721 desa yang tersebar di 29 kabupaten dan 9 kota. Beberapa kabupaten dengan jumlah desa terbanyak antara lain:

1. Kabupaten Lamongan: 462 desa
2. Kabupaten Bojonegoro: 419 desa
3. Kabupaten Malang: 378 desa
4. Kabupaten Pasuruan: 341 desa
5. Kabupaten Kediri: 343 desa

Secara keseluruhan, wilayah perdesaan ini mencakup sebagian besar luas daratan Jawa Timur yang mencapai 48.036,84 Km², perumahan didominasi rumah swadaya dengan kualitas beragam sehingga memerlukan peningkatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, kawasan pesisir dan rawan bencana membutuhkan standar rumah tahan bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi risiko. Kondisi ini menuntut pendekatan penyelenggaraan perumahan yang adaptif sesuai tipologi wilayah dan tingkat risiko. Menurut data BPBD Jawa Timur Tahun 2025, jumlah desa/kelurahan rawan bencana mencapai sekitar 5.254 desa/kelurahan, meningkat dibanding periode sebelumnya. Sepanjang Januari–Oktober 2025 tercatat lebih dari 260 kejadian bencana, didominasi oleh banjir, angin kencang, tanah longsor, dan kebakaran hutan/lahan⁶. Wilayah dengan risiko tinggi antara lain kawasan tapal kuda, perbukitan selatan, dan daerah sekitar gunung api aktif seperti Gunung Semeru. Kondisi ini menuntut integrasi mitigasi risiko dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Kondisi geologis dan iklim Jawa Timur menempatkan provinsi ini pada tingkat indeks risiko bencana yang tinggi dengan berbagai ancaman yang kompleks. Ancaman banjir menjadi perhatian serius di 12 wilayah, terutama di Ponorogo, Malang, Sidoarjo, serta seluruh wilayah Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Di sektor geologi, wilayah selatan seperti Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan Malang memiliki risiko gempa bumi kategori tinggi, yang dibarengi dengan ancaman tsunami di sepanjang pesisir selatan Jawa Timur. Selain itu, potensi kebakaran hutan dan lahan membayangi 31 kabupaten/kota, dengan tingkat risiko tertinggi berada di 14 wilayah termasuk Banyuwangi, Jember, dan Situbondo. Kerentanan ini semakin lengkap dengan keberadaan 10 gunung api aktif yang terus dipantau risikonya, di antaranya adalah Gunung Semeru, Kelud, Bromo, dan Ijen

⁶ BPBD Provinsi Jawa Timur, *Data Desa/Kelurahan Rawan Bencana dan Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2025*.

yang secara historis memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya⁷.

Berdasarkan *dashboard* perumahan Kementerian PKP Tahun 2025 menunjukkan bahwa data *backlog* perumahan di Provinsi Jawa Timur masih cukup signifikan mencapai 14.733.859 rumah tangga, yang terdiri atas *backlog* kepemilikan sebesar 1.866.607 unit dan *backlog* Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 2.546.007 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga rumah tangga di Jawa Timur masih menghadapi permasalahan akses kepemilikan rumah atau kualitas hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.

Tabel 1. 2. Data *Backlog* Perumahan Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 2025

No.	Kabupaten/Kota	<i>Backlog</i> Kepemilikan	<i>Backlog</i> Kualitas	Total <i>Backlog</i> Perumahan
1	Kab. Jember	124.758	195.098	319.856
2	Kota Surabaya	189.375	96.206	285.581
3	Kab. Malang	99.053	165.331	264.384
4	Kab. Probolinggo	51.846	145.900	197.746
5	Kab. Sumenep	19.612	163.109	182.721
6	Kab. Bojonegoro	49.871	117.058	166.929
7	Kab. Banyuwangi	85.498	71.114	156.612
8	Kab. Pasuruan	47.720	107.309	155.029
9	Kab. Sidoarjo	93.478	56.620	150.098
10	Kab. Bangkalan	29.842	119.417	149.259
11	Kab. Bondowoso	28.224	120.901	149.125
12	Kab. Kediri	92.821	55.298	148.119
13	Kab. Pamekasan	21.967	113.796	135.763
14	Kab. Blitar	64.746	67.122	131.868
15	Kab. Lumajang	39.649	90.825	130.474
16	Kab. Jombang	83.177	45.848	129.025
17	Kab. Nganjuk	68.161	59.250	127.411
18	Kab. Ngawi	46.614	80.681	127.295
19	Kab. Tuban	45.412	75.754	121.166
20	Kab. Situbondo	30.607	87.654	118.261
21	Kab. Tulungagung	64.903	52.531	117.434
22	Kab. Gresik	63.340	42.218	105.558
23	Kab. Lamongan	49.190	46.147	95.337
24	Kab. Mojokerto	60.028	32.519	92.547
25	Kab. Sampang	23.418	68.160	91.578
26	Kab. Ponorogo	45.008	43.003	88.011
27	Kab. Trenggalek	29.878	57.294	87.172

⁷ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.

No.	Kabupaten/Kota	<i>Backlog</i> Kepemilikan	<i>Backlog</i> Kualitas	Total <i>Backlog</i> Perumahan
28	Kab. Pacitan	15.865	60.503	76.368
29	Kota Malang	45.888	26.477	72.365
30	Kab. Madiun	37.744	34.204	71.948
31	Kab. Magetan	34.274	14.881	49.155
32	Kota Kediri	21.816	4.274	26.090
33	Kota Probolinggo	11.246	8.649	19.895
34	Kota Pasuruan	10.374	6.869	17.243
35	Kota Madiun	13.510	1.806	15.316
36	Kota Batu	7.504	6.391	13.895
37	Kota Blitar	10.429	3.295	13.724
38	Kota Mojokerto	9.761	2.495	12.256
Total		1.866.607	2.546.007	4.412.614

Sumber: <https://my.pkp.go.id/dashboardhome>

Menurut data BPS Jawa Timur 2024 rumah tangga menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal secara keseluruhan mayoritas rumah tangga di Jawa Timur telah memiliki hunian sendiri. Angka rata-rata provinsi menunjukkan bahwa 90,93% rumah tangga memiliki status milik sendiri, sementara hanya 2,61% dengan status sewa/kontrak, dan 6,46% berada pada kategori lainnya⁸. Secara makro Jawa Timur memiliki ketahanan pangan yang baik dengan 9 dari 10 rumah tangga sudah tinggal di rumah milik sendiri. Namun, tantangan penyediaan hunian terlihat di area metropolitan seperti Surabaya, di mana hampir 40% warganya belum memiliki rumah sendiri.

Selain permasalahan *backlog* dan kualitas hunian, Provinsi Jawa Timur juga menghadapi persoalan kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan Sistem Informasi Kawasan Kumuh (SIKAWANKU) Provinsi Jawa Timur 2025, luas kawasan kumuh awal tercatat sekitar 8.117,23 ha yang tersebar di 892 lokasi kawasan kumuh dan 4.861 kelurahan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Sedangkan kawasan kumuh yang sudah tertangani seluas 1.619,48 ha dan masih menyisakan kawasan kumuh dengan luas 6.497,76 ha. Permasalahan kumuh tersebut ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi, kualitas jalan lingkungan yang belum memadai, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, keterbatasan akses air minum layak, serta pengelolaan air limbah dan persampahan yang belum sesuai standar teknis.

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025*, Hal.234.

Tabel 1. 3. Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2025

No	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh Awal (Ha)	Kumulatif Penanganan (Ha)	Sisa Luas Kumuh (Ha)
1	Kab. Pacitan	16,48	16,48	0
2	Kab. Ponorogo	192,03	12,25	179,78
3	Kab. Trenggalek	174,17	8,49	165,68
4	Kab. Tulungagung	194,51	24,18	170,33
5	Kab. Blitar	437,6	104,53	333,07
6	Kab. Kediri	480,25	215,23	265,02
7	Kab. Malang	142,87	42,54	100,33
8	Kab. Lumajang	763,97	34,07	729,9
9	Kab. Jember	574,05	222,66	351,39
10	Kab. Banyuwangi	95,08	8,82	86,26
11	Kab. Bondowoso	433,92	9,75	424,17
12	Kab. Situbondo	102,84	31,22	71,62
13	Kab. Probolinggo	201,77	7,98	193,79
14	Kab. Pasuruan	440,44	63,12	377,32
15	Kab. Sidoarjo	140,43	132,01	8,42
16	Kab. Mojokerto	246,51	50,75	195,77
17	Kab. Jombang	618,16	18,4	599,76
18	Kab. Nganjuk	83,33	63,48	19,85
19	Kab. Madiun	161,41	70,28	91,13
20	Kab. Magetan	292,03	18,74	273,29
21	Kab. Ngawi	48,13	0	48,13
22	Kab. Bojonegoro	141,36	36,38	104,98
23	Kab. Tuban	211,37	171,75	39,62
24	Kab. Lamongan	360,98	5,18	355,81
25	Kab. Gresik	255,03	25,82	229,21
26	Kab. Sampang	342,48	0	342,48
27	Kab. Pamekasan	173,13	51,71	121,42
28	Kab. Sumenep	137,38	27,28	110,1
29	Kota Kediri	135,78	18,96	116,82
30	Kota Blitar	140,57	63,16	77,41
31	Kota Malang	27,21	0	27,21
32	Kota Probolinggo	23,34	1,49	21,85
33	Kota Pasuruan	117,51	5,19	112,31
34	Kota Madiun	211,11	57,58	153,53
	Total	8.117,23	1.619,48	6.497,76

Sumber: Sistem Informasi Kawasan Kumuh (SIKAWANKU) Provinsi Jawa Timur

Permasalahan tersebut umumnya terkonsentrasi di kawasan padat perkotaan, bantaran sungai, wilayah pesisir, serta kantong-kantong kemiskinan perkotaan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan risiko kesehatan dan kerentanan terhadap bencana.

Data BPS Jatim 2024 menyebutkan bahwa distribusi rumah tangga menurut fasilitas sanitasi sebanyak 95,99% rumah tangga telah mendapatkan fasilitas sanitasi dasar cukup baik. Rumah tangga memiliki jamban sendiri sejumlah 88,12%, 7,87% rumah tangga mendapatkan akses sanitasi secara komunal maupun MCK umum. Namun, masih terdapat 4,01% rumah tangga tanpa fasilitas sanitasi, yang berpotensi melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS)⁹. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun target akses sanitasi layak telah mendekati *universal*, masih diperlukan intervensi pada kelompok rentan, khususnya di kawasan perdesaan tertinggal dan permukiman kumuh.

Aspirasi masyarakat Jawa Timur terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal berfokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini mencakup kebutuhan mendesak akan kemudahan akses pembiayaan, jaminan kepastian legalitas aset, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai dan tangguh terhadap risiko bencana¹⁰

Selain aspek bangunan fisik, masyarakat juga mengharapkan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) yang memadai serta terintegrasi untuk mendukung kualitas lingkungan permukiman. Mengingat kondisi geologis wilayah yang rawan, aspirasi utama lainnya adalah terwujudnya hunian yang aman dari risiko bencana (*resilien*). Menanggapi hal tersebut, arah kebijakan jangka panjang Jawa Timur difokuskan pada penguatan ekosistem pembiayaan, fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya, pembangunan rumah susun di kawasan aglomerasi, serta percepatan penyusunan rencana detail tata ruang yang mengedepankan aspek keamanan dan keberlanjutan.

Penguatan tata kelola melalui optimalisasi Klinik PKP menjadi penting sebagai sarana konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan teknis terkait pembiayaan, regulasi, dan standar pembangunan. Dukungan regulasi dan SOP yang terstandar khususnya dalam verifikasi data, penyaluran bantuan, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan publik diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah serta pencapaian target pembangunan perumahan.

Dalam konteks kebijakan nasional, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Timur merupakan bagian dari implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah, yang bertujuan mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau melalui pembangunan rumah tapak bersubsidi, rumah susun, rumah khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025*, Hal.231.

¹⁰ Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jatim 2025-2029: "*Isu Strategis IV: Integrasi Penyediaan PSU dan Mitigasi Bencana pada Kawasan Permukiman Strategis*

dan penanganan kawasan kumuh. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi prioritas dalam pencapaian target nasional tersebut mengingat tingginya kebutuhan hunian dan luasnya kawasan kumuh yang perlu ditangani.

Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV Periode 2025–2029 disusun sebagai evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan perumahan periode sebelumnya. Berdasarkan data perbandingan capaian tahun 2020 hingga 2024, secara umum BP2P Jawa IV (sebelumnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV) menunjukkan tren kinerja yang stabil dengan mayoritas indikator mencapai target **100 % (Kinerja Baik)**.

Namun terdapat beberapa catatan fluktuasi kinerja pada indikator tertentu sebagai berikut:

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

- a. **Tahun 2021:** Capaian indikator Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya mengalami penurunan menjadi **71%**. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan pagu anggaran dari *National Affordable Housing Program* (NAHP) pada tahun berjalan.
- b. **Tahun 2024:** Realisasi kinerja tercatat sebesar **99,99%**, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh pembatalan dua orang Penerima Bantuan (PB),

2. Pemeliharaan Rumah Susun

Indikator Jumlah Rumah Susun yang dipelihara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir:

- a. **Tahun 2020:** Kinerja berada pada kategori **Sangat Kurang (60%)**.
- b. **Tahun 2022:** Mengalami kenaikan menjadi **67%**, meskipun masih dalam kategori **Kurang**.
- c. **Tahun 2023:** Berhasil mencapai target **100%** dengan predikat **Kinerja Baik**.

Tabel 1. 4. Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Tahun 2020 - 2024

Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerj (%)
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni																	
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	6	6	100	5	5	100	6	6	100	5	5	100	2	2	100
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	13.000	13.000	100	24.419	17.407	71	33.293	33.293	100	22.919	22.919	100	22.976	22.974	99.99
	3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	-	-	-	893	893	100	187	189	101	364	364	100	573	573	100
	4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	15	9	60	0	0	-	3	2	67	4	4	100	-	-	-
	5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-	-	-	67	67	100	1.951	1951	100	1	1	100	1	1	100
	1. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Jumlah Rumah Umum yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	-	-	-	2.651	2.651	100	1.323	1.323	100	3.300	3.546	108	1.550	1.569	101.23
	3. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan manajemen Risiko		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	100	3	3	100

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan																	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	a. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	2	2	100	3	3	100	3	3	100	1	1	100	1	1	100
	b. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	2	2	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100
	c. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100

Sumber: Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Tahun 2024

B. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman menjadi langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tepat. Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan adalah pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat. Pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan penyediaan jumlah rumah yang terbangun. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif ditambah rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal di rumah layak huni. Hal tersebut berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan permukiman kumuh baru. Terlebih dalam pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan (*urban area*) yang terkendala dengan proses pengadaan lahan.

1. Potensi

Potensi merupakan faktor pendukung yang memperkuat peran strategis Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai perlu mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia guna menjawab berbagai permasalahan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan terarah. Pada periode perencanaan Tahun 2025–2029, potensi penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Timur memiliki peluang untuk dioptimalkan melalui sinergi kebijakan, dukungan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan sumber daya yang ada. Sejalan dengan peran strategis tersebut, potensi pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Potensi Internal

BP3KP Jawa IV memiliki kekuatan internal yang bersumber dari struktur organisasi yang matang dan ketersediaan SDM spesialis yang kompeten dalam mengawal siklus pembangunan perumahan, yaitu sebagai berikut:

1). Kekuatan SDM Teknis dan Penataan Perumahan (Katalisator Teknis)

Balai didukung oleh pejabat fungsional keahlian khusus, meliputi Teknik Penyehatan Lingkungan, Penata Kelola Perumahan, Penata Kelola Bangunan

Gedung Kawasan Permukiman, serta Analis Perumahan. Formasi ini menjamin kualitas teknis pembangunan hunian dan kawasan yang memenuhi standar kelaikan dan keberlanjutan.

2). Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Perbendaharaan (Akselerator Program)

Memiliki struktur kesatkeran yang solid dengan Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat SPM, Bendahara, serta Analis Keuangan. Keberadaan tim perbendaharaan yang lengkap ini memastikan penyerapan anggaran program (seperti BSPS dan pembangunan fisik) berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

3). Efisiensi Layanan Operasional dan Digitalisasi (Hub Pelayanan)

Dukungan tenaga Pranata Komputer dan Analis/Pengelola Layanan Operasional memungkinkan optimalisasi sistem digital seperti SIBARU dan Klinik PKP. Didukung oleh Operator Layanan dan Pengadministrasi Perkantoran, Balai mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Jawa Timur.

4). Manajemen Aset dan Administrasi Aparatur (Fasilitator Kelembagaan)

Memiliki Pengelola BMN yang menjamin akurasi data aset negara melalui sistem SIMAN, serta Analis SDM Aparatur dan Arsiparis yang memastikan manajemen internal serta dokumentasi negara dikelola secara profesional sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

b. Potensi Eksternal

Potensi eksternal mencakup seluruh aktor di luar Balai yang menjadi mitra strategis dalam percepatan penyelenggaraan perumahan:

1). Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Pemerintah daerah berperan sebagai penyusun RP3KP dan penyedia pendampingan anggaran melalui APBD untuk penanganan RTLH serta kawasan kumuh. Sebagai data dukung, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PRKPCK menetapkan target hunian layak sebesar 72,62% pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai 70,74%¹¹. Untuk mendukung capaian ini, dialokasikan anggaran peningkatan kontribusi hunian sebesar Rp 1,156 Triliun dengan tingkat penyerapan sebesar 85,64%.

¹¹ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, *Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029*, (Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2024), Bab II: Gambaran Umum Pelayanan, hlm. 14

2). Lembaga Sektoral dan Data (BPS, Komdigi, Bappenas)

Lembaga-lembaga ini menjadi mitra integrasi data untuk memastikan intervensi program tepat sasaran (*Zero Backlog*). Salah satu bentuk nyata integrasi data ini tercermin dalam mekanisme koordinasi antara BP2P Jawa IV dengan pemerintah daerah untuk melakukan validasi data calon penerima bantuan (CPB) agar tidak terjadi duplikasi bantuan. Contoh implementasinya adalah *joint survey* di lokasi *pilot project* Kelurahan Jagir, Surabaya, yang melibatkan Satker PKP Provinsi dan Pemerintah Kota.

3). Ekosistem Keuangan dan Swasta (Bank Jatim, HIMBARA, Pengembang)

Sektor ini berperan sebagai penyedia skema pembiayaan dan pelaksana pembangunan fisik. Bank Jatim, sebagai salah satu aktor kunci, secara konsisten menyelaraskan program CSR "Bank Jatim Peduli" dengan prioritas pemerintah daerah. Data menunjukkan pada tahun 2022, Bank Jatim mengalokasikan Rp 946,6 juta khusus untuk sub-bidang RTLH. Distribusi bantuan tersebut mencakup pembangunan 50 unit rumah di Ngawi senilai Rp 250 juta, 17 unit di Tulungagung, dan 20 unit di Situbondo.

4). Masyarakat dan Kearifan Lokal

Budaya Gotong Royong adalah bentuk kearifan lokal masyarakat sebagai pondasi penting budaya di Jawa Timur, penting sebagai potensi masyarakat yang menjadi motor penggerak utama dalam program perumahan berbasis komunitas (*swadaya*).

5). BUMN, Swasta dan Perorangan melalui Program CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Kontributor pendanaan alternatif untuk mendukung peningkatan kualitas rumah dan prasarana sarana umum (PSU).

2. Permasalahan

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Jawa IV menghadapi tantangan ganda. Secara eksternal, Jawa Timur masih dihadapkan pada angka *backlog* yang mencapai 4,4 juta unit, kendala legalitas lahan, serta kualitas permukiman yang kumuh. Kondisi ini diperberat oleh tantangan internal Balai, di mana luasnya cakupan wilayah kerja belum didukung dengan jumlah SDM dan anggaran operasional yang memadai. Akibatnya, fungsi pengawasan, pemantauan mutu, dan integrasi data sosial ekonomi belum berjalan optimal, yang menuntut adanya penguatan tata kelola organisasi secara menyeluruh.

a. Permasalahan Wilayah dan Isu Strategis

1). Keterbatasan Lahan dan Infrastruktur

Terbatasnya ketersediaan lahan serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) menjadi kendala nyata dalam perluasan kawasan permukiman di Jawa Timur.

2). Kesenjangan Hunian (*Backlog*)

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan penyediaan rumah. Berdasarkan data Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN), terdapat *backlog* sebanyak 4.412.614 unit (1,8 juta *backlog* kepemilikan dan 2,5 juta *backlog* kelayakan) yang dipicu oleh rendahnya daya beli masyarakat¹².

3). Rendahnya Kualitas Hunian

Banyak permukiman mengalami kepadatan tinggi dengan kondisi tidak layak huni, akses air bersih minim, sanitasi buruk, serta konstruksi yang tidak memenuhi standar teknis kesehatan.

4). Kendala Legalitas Tanah

Banyak rumah berdiri di atas lahan tanpa surat kepemilikan sah, sehingga sulit memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan bantuan pemerintah.

5). Efektivitas Bantuan dan Perlindungan Konsumen

Penyaluran bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, rendahnya mutu rumah subsidi, serta belum maksimalnya perlindungan bagi konsumen perumahan.

6). Belum tersedianya sistem informasi yang akurat dan terintegrasi terkait data spasial serta sosial ekonomi, sehingga perencanaan dan pengawasan menjadi lemah.

7). Hambatan Eksternal

Adanya intervensi dan kendala non-teknis di lapangan, seperti aduan masyarakat atau gangguan dari pihak luar yang menghambat progres pembangunan.

b. Permasalahan Internal Balai (Tantangan Operasional)

1). Luasnya cakupan wilayah Jawa Timur yang sangat luas menjadi tantangan geografis utama dalam pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi program secara intensif.

2). Keterbatasan jumlah personil yang tersedia belum sebanding dengan beban kerja dan luas wilayah koordinasi, serta perlunya peningkatan kompetensi teknis SDM dalam pengawasan mutu di lapangan.

¹² Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, "Dashboard Capaian Sektor Perumahan," <https://my.pkp.go.id/dashboardpkp>, (diakses pada 20 Desember 2025)

- 3). Belum optimalnya penguatan tata kelola organisasi dan sistem pelaporan internal yang terintegrasi untuk mendukung birokrasi yang lebih lincah.
- 4). Keterbatasan anggaran operasional menjadi kendala signifikan dalam mengoptimalkan mobilisasi tim untuk pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh kabupaten/kota.
- 5). Lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan disebabkan keterbatasan sumber daya dan luas wilayah, fungsi pengawasan terhadap pengembang dan hasil pembangunan di daerah terpencil masih sulit dilakukan secara berkala.

3. Analisis SWOT

Analisa SWOT penyelenggaraan perumahan BP3KP Jawa IV terhadap potensi dan permasalahan di wilayah kerja BP3KP Jawa IV sebagai berikut.

a. Analisis Potensi dan Permasalahan

Tabel 1. 5. Analisis Potensi dan Permasalahan

No.	Potensi (Kekuatan/Peluang)	Permasalahan (Kelemahan/Tantangan)	Analisis Sebab-Akibat dan Dampak Strategis
1	SDM Teknis Spesialis (Penata Kelola Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan)	Mutu bangunan rendah dan sanitasi buruk	Keahlian teknis internal Balai belum teroptimalisasi pada pengawasan lapangan secara masif, berakibat pada konstruksi yang tidak memenuhi standar kesehatan/teknis.
2	Sistem Digital SIBARU dan Klinik PKP	Data tidak akurat dan sasaran tidak tepat	Belum terintegrasinya SIBARU dengan data spasial/DTSN menyebabkan perencanaan lemah dan melewatnya target intervensi backlog (4,4 juta unit).
3	Komitmen Pemda dan RP3KP	Legalitas tanah belum ada	Meski ada komitmen Pemda, ketiadaan sertifikat tanah menjadi penghambat utama penyaluran bantuan, sehingga dana APBN/APBD seringkali tidak terserap optimal.
4	Ekosistem Pengembang dan Perbankan	Daya beli rendah dan perlindungan konsumen lemah	Pertumbuhan ekonomi Jatim belum selaras dengan aksesibilitas finansial MBR; diperlukan peran Balai sebagai fasilitator untuk memperkuat posisi tawar konsumen.
5	Aset Negara (SIMAN) dan SAKTI	Keterbatasan lahan dan anggaran	Pemanfaatan aset BMN (SIMAN) belum menjadi solusi utama untuk mengatasi kelangkaan lahan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

b. Analisa SWOT Jangka Menengah (2025–2029)

1). Kekuatan (*Strengths* - Internal Balai)

a). Struktur SDM Multidisiplin

Ketersediaan fungsional teknis (Perumahan, Lingkungan, Bangunan Gedung) dan manajerial (SDM, Keuangan, BMN) yang lengkap untuk mengawal seluruh siklus proyek.

b). Inovasi Layanan Digital

Platform Klinik PKP dan SIBARU sebagai basis transparansi publik.

c). Kapasitas Perbendaharaan

Tim kesatkeran yang berpengalaman dalam mengelola anggaran besar secara akuntabel.

2). Kelemahan (*Weaknesses* - Internal Balai)

a). Pengawasan Lapangan Belum Maksimal

Terbatasnya jumlah personel dibandingkan luas wilayah BP3KP Jawa IV mengakibatkan lemahnya penindakan terhadap pengembang yang melanggar standar mutu.

b). Fragmentasi Data

Belum adanya sistem informasi spasial yang *real-time* untuk memantau progres fisik dan status lahan secara terintegrasi.

c). Keterbatasan Anggaran Operasional

Kendala dalam melakukan pendampingan teknis yang intensif hingga ke tingkat desa/perdesaan.

3). Peluang (*Opportunities* - Eksternal)

a). Momentum Program Strategis Nasional

Target 3 Juta Rumah dan intervensi kemiskinan ekstrem menjadi payung hukum dan politik yang kuat.

b). Modal Sosial Jawa Timur

Budaya Gotong Royong masyarakat dapat menekan biaya pembangunan melalui skema swadaya (BSPS).

c). Dukungan *Multi-Stakeholder*

Sinergi dengan BPS, Komdigi, dan Bappenas dalam pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk akurasi sasaran.

4). Tantangan (*Threats* - Eksternal)

a). Ketimpangan *Supply-Demand*

Ledakan laju pertumbuhan penduduk di wilayah metropolitan tidak sebanding dengan ketersediaan lahan murah menjadi tantangan dalam penyediaan hunian vertikal (rusun) dan infrastruktur PSU.

b). Kendala Legalitas Formal

Status tanah yang tidak bersertifikat menghambat MBR mengakses program bantuan perumahan.

c). Resistensi dan Intervensi Eksternal

Munculnya aduan masyarakat atau gangguan pihak luar yang dapat menghambat jadwal pelaksanaan fisik di lapangan.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA STRATEGIS
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN JAWA IV
TAHUN 2025-2029

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Tahun 2025–2029 **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** dan **“Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan”** BP3KP Jawa IV sebagai unit pelaksana teknis di Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan sebagaimana penjabaran dari tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pertama yaitu **“peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif di Provinsi Jawa Timur”**.
2. Tujuan kedua yaitu **“Peningkatan kualitas tata kelola Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV”**, dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kualitas tata kelola dilakukan melalui penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap proses bisnis balai yang diimplementasikan melalui peningkatan kualitas program dukungan manajemen penyelenggaraan balai.

B. Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV menjabarkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, melalui serangkaian program dan kegiatan. Sasaran Program (SP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV merupakan turunan dari Sasaran Strategis (SS) Kementerian yaitu sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Hunian Layak**, yaitu melalui kegiatan Penyelenggaraan Sistem dan Strategi, Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Saran, Utilitas Umum, Penyediaan Layak Huni dan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan;
2. **Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh**, melalui kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh;

3. **Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dengan kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
4. **Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV**, melalui kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV.

Sasaran Program (SP) tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV yang ditargetkan selama periode 2025-2029, sebagai berikut:

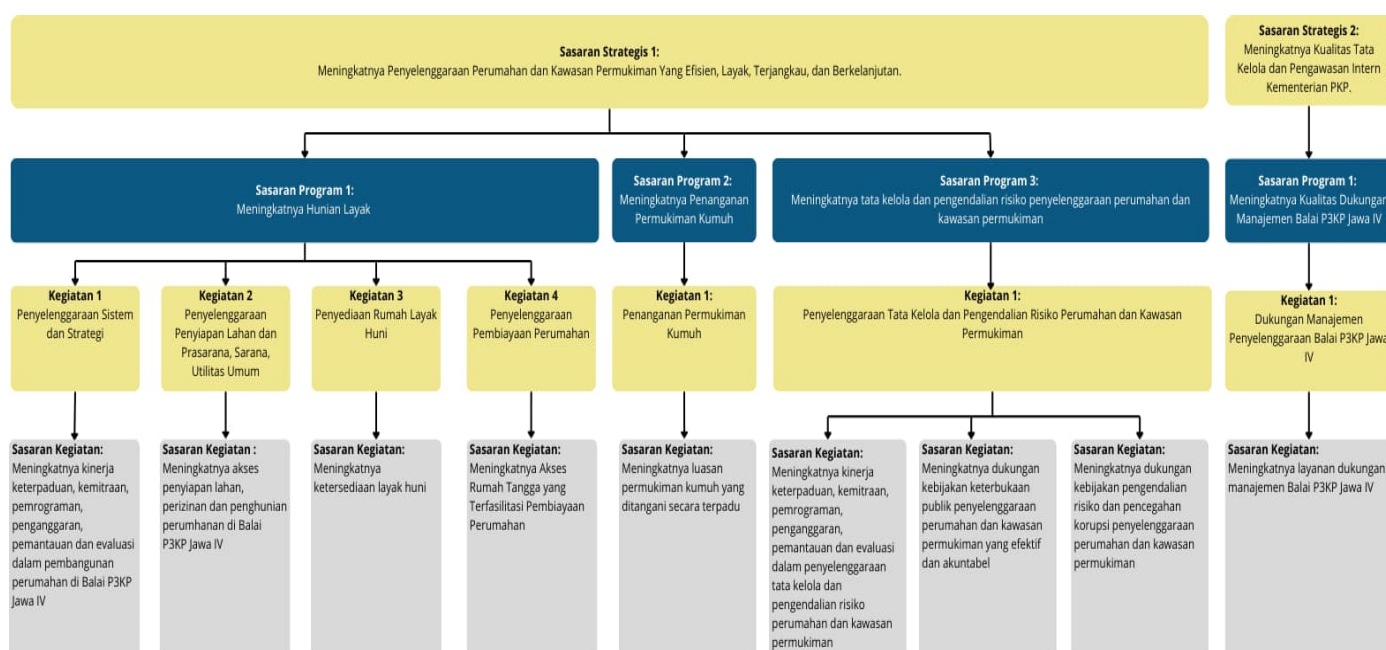
Tabel 2. 1. Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BP3KP Jawa IV

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Meningkatnya Hunian Layak	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Jawa IV	• Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni • Persentase rumah tanggadengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di BP3KP Jawa IV • Persentase desa yangmendapat intervensi penurunan RTLH di BP3KP Jawa IV
	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Saran, Utilitas Umum	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di BP3KP Jawa IV	• Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU • Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
			Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal
	Penyediaan Rumah Layak Huni	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	- Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas - Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru - Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman
	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	Penanganan Permukiman Kumuh	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan Kawasan permukiman
		Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
		Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
		penyelenggaraan perumahan	korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BP3KP Jawa IV	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan BP3KP Jawa IV	Meningkatnya layanan dukungan manajemen BP3KP Jawa IV	Tingkat layanan dukungan manajemen BP3KP Jawa IV

Sasaran Strategis, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan BP3KP Jawa IV digambarkan ke dalam bagan Pohon Kinerja BP3KP Jawa IV sebagaimana berikut.



Gambar 2. 1. Pohon Kinerja BP3KP Jawa IV



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

RENCANA STRATEGIS
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN JAWA IV
TAHUN 2025-2029

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1). Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - 2). Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - 3). Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - 4). Penyediaan PSU pada hunian tapak dan vertikal.
- b. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1). Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - 2). Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
 - 3). Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- c. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.
- d. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1). Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- 2). Peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
 - 3). Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4). Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
 - 5). Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
 - 6). Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.
2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - 1). Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - 2). Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - 3). Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan;
 - 4). Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - 5). Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
 - b. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:
 - 1). Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - 2). Pengembangan skema tabungan berencana;
 - 3). Pengembangan bantuan tunai/*in-kind* yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
 - 4). Pengembangan skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR);
 - 5). Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 - 6). Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
 - c. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:

- 1). Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
 - 2). Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 - 3). Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
 - 4). Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - 5). Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - 6). Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - 7). Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
- d. Meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
- 1). Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - 2). Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - 3). Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah;
 - 4). Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - 5). Penguatan kelembagaan.
3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
- 1). Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - 2). Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - 3). Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - 4). Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

- b. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
 - c. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
 - d. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - 1). Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - 2). Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - 3). Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4). Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - 5). Penguatan kelembagaan.
 - e. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
 - f. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
 - g. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
 - h. Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.
4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR)

- a. Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
- b. Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- c. Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1). Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema terjangkau di Indonesia (*Indonesia Green Affordable Housing Program* atau IGAHP).
 - 2). Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain.
 - 3). Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan.
 - 4). Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
- d. Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri PKP tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e. Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- f. Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:

- 1). *Governance*, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
 - 2). *Risk*, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
 - 3). *Compliance*, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - 4). *Financing*, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (*off-take guarantee*); dan pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.
5. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal
- Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:
- a. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
 - 1). Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - 2). Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
 - b. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
 - 1). Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - 2). Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
 - c. Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:
 - 1). Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis beban (ABK) dan kompetensi;
 - 2). Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - 3). Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
 - d. Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
 - 1). Sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
 - 2). Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).
 - e. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:

- 1). Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
- 2). Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- f. Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
 - 1). Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - 2). Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).
- g. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
 - 1). Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - 2). Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- h. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
 - 1). Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
 - 2). Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem *e-Procurement* untuk efisiensi dan transparansi.
- i. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
 - 1). Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
 - 2). Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- j. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:
 - 1). Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan
 - 2). Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Jawa IV

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian PKP dan unit organisasi, berikut arah kebijakan dan strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Permukiman Jawa IV untuk tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan secara terpadu di Provinsi Jawa Timur dengan strategi:
 - a. Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - b. Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau

- d. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertikal.
 - e. Penyediaan fasilitas ramah gender, dengan memastikan desain rumah tapak dan/atau vertikal memiliki pencahayaan memadai di koridor, ruang laktasi, taman bermain anak yang terpantau, serta akses bagi penyandang disabilitas dan lansia.
 - f. Fasilitasi akses informasi hunian yang layak dan terjangkau melalui sosialisasi program perumahan melibatkan industri material, pengembang dan perbankan.
2. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu di Provinsi Jawa Timur melalui strategi:
- a. Pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu, melalui sinkronisasi penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) daerah dengan program nasional;
 - b. Penataan kawasan kumuh melalui penataan, perbaikan, dan pembangunan hunian dan infrastruktur kawasan permukiman;
 - c. Peningkatan kolaborasi, pembinaan, dan fasilitasi kepada pemangku kepentingan, pelaku usaha, dan konsumen perumahan dalam rangka penguatan penyelenggaraan perumahan;
 - d. Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR;
 - f. Kolaborasi dalam penyelenggaraan verifikasi dan penyediaan data penerima manfaat program bantuan perumahan dan kawasan permukiman agar tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat manfaat.
3. Penguatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui strategi:
- a. Dukungan pembangunan dan penerapan Zona Integritas;
 - b. Dukungan penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP); dan
 - c. Pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko.
4. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
- a. Perbaikan kualitas layanan tata usaha pengelolaan kearsipan, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - b. Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas.

1. Tugas dan Fungsi BP3KP Jawa IV

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV mempunyai tugas:

“Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penetaan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitasi serah terima aset”.

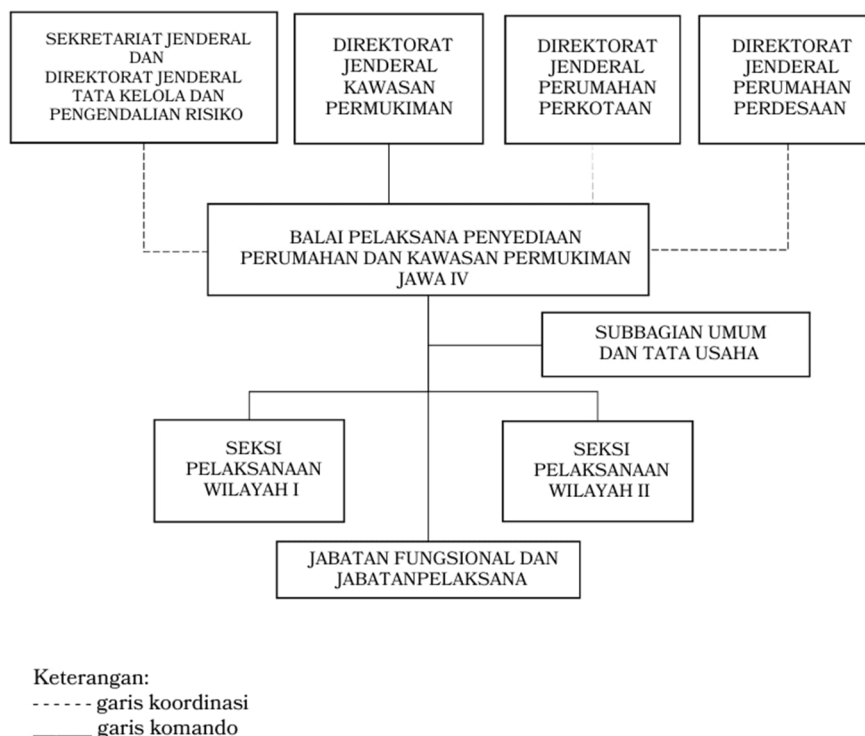
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan Kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset

- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, Pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

2. Struktur Organisasi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV memiliki strategi pengelolaan sumber daya internal yang dimiliki agar seluruh proses dapat berjalan optimal. Berdasarkan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedudukan organisasai BP3KP Jawa IV secara garis komando bertanggung jawab langsung kepada Unit Organisasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, berkoordinasi dengan 5 Unit Organisasi lain Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, sebagaimana ditunjukkan dalam struktur organisasi berikut.



Gambar 3. 1. Bagan SOTK UPT BP3KP Jawa IV

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Balai

Mempunyai tugas sebagai penanggung jawab utama pelaksana seluruh tugas dan fungsi BP3KP di wilayah Jawa IV (Wilayah kerja Provinsi Jawa Timur)

b. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan Pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

c. Seksi Pelaksana Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas:

- 1). Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; serta
- 2). Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitas penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantaauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

d. Seksi Pelaksana Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 3. 2. Struktur Organisasi BP3KP Jawa IV

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Profil SDM

BP3KP Jawa IV dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh kapasitas sumber daya manusia sebanyak 83 orang ASN. Dukungan pegawai tersebut dengan komposisi mencakup 82 pegawai PNS dan PPPK *Full Time* yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada berbagai jenjang jabatan, serta 1 orang PPPK Paruh Waktu yang turut mendukung efektivitas organisasi. Adapun rincian komposisi pegawai BP3KP Jawa IV sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan

No	Status Pegawai	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		<SMA	D1-D3	D4/S1	S2	
1	PNS	2	0	10	16	28
2	PPPK	18	4	33	0	55
Total		20	4	43	16	83

Sumber: BP3KP Jawa IV, 2025

Tabel 3. 2. Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Status Pegawai	Golongan							Jumlah
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V	Gol. VIII	Gol. IX	
1	PNS	0	1	21	6	0	0	0	28
2	PPPK	1	0	2	0	14	4	33	54
Total		1	1	23	6	14	4	33	82

Sumber: BP3KP Jawa IV, 2025

Berdasarkan tabel 3.2, pegawai yang memiliki golongan sejumlah 82 orang yang terdiri dari pegawai PNS dan PPPK *Full Time*. Sedangkan terdapat 1 orang pegawai PPPK Paruh Waktu yang tidak memiliki golongan pegawai.

Tabel 3. 3. Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Status Pegawai	Jabatan			Jumlah
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	PNS dan PPPK	4	46	33	83
Total		4	46	33	83

Sumber: BP3KP Jawa IV, 2025

Tabel 3. 4. Distribusi PNS dan PPPK BP3KP Jawa IV

No	Unit Kerja/Satker	PNS	PPPK	Jumlah
1	BP3KP Jawa IV	15	24	39
2	Satker PKP Provinsi Jawa Timur	13	31	44
Total		28	55	83

Sumber: BP3KP Jawa IV, 2025

b. Peta Jabatan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan ideal pegawai dalam mendukung kinerja Balai, maka berdasarkan 83 orang pegawai BP3KP Jawa IV yang ada perlu disusun analisa beban kerja untuk mengetahui kebutuhan ideal pegawai.

Berdasarkan analisis beban kerja yang telah disusun kedalam peta jabatan, balai memiliki kebutuhan ideal sebanyak 111 pegawai, masih terdapat *gap* formasi sebanyak 28 posisi yang perlu dipenuhi untuk mencapai kapasitas organisasi yang optimal, sebagaimana peta jabatan BP3KP Jawa IV berikut.

Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV			
Kepala Balai			
	1	1	0

Kelompok Jabatan Fungsional	K	B	F
JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	5	2	3
JF Arsiparis Ahli Pertama (*)(5 orang)	5	5	0
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	3	4	-1
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	5	3	2
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama (*)(3 orang)	10	5	5
JF Penata Kelola Bangunan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Madya	2	0	2
JF Penata Kelola Bangunan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda	5	2	3
JF Penata Kelola Bangunan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Pertama (*)(4 orang)	10	6	4
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	1	1	0
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	1	0
JF Pranata Komputer Terampil (*)(1 orang)	1	1	0
JF Pengelola BMN	1	1	0
Jumlah Terpenuhi/Dibutuhkan	49	31	18

Kasubbag. TU	K	B	F
Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	1	0
JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	2	0
JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	1
JF Arsiparis Ahli Pertama (*)(4 orang)	4	4	0
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (*)(4 orang)	5	5	0
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	4	2	2
JF Pengelola BMN	1	1	0
Penata Layanan Operasional (*)(4 orang)	4	4	0
Pengelola Layanan Operasional (*)(3 orang)	3	3	0
Operator Layanan Operasional (*)(13 orang)	13	13	0
Pengadministrasian Perkantoran (*)(2 orang)	2	2	0
Pengelola Umum Operasional (*)(3 orang)	3	3	0
Jumlah Terpenuhi/Dibutuhkan	43	40	3

Seksi Pelaksanaan Wilayah I	K	B	F
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	1	0
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama (*)(2 orang)	2	2	0
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	2	1	1
JF Penata Kelola Bangunan Gedung Kawasan Permukiman Ahli pertama (*)(1 orang)	2	1	1
JF Penata Kelola Bangunan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda	2	0	2
Jumlah Terpenuhi/Dibutuhkan	9	5	4

Seksi Pelaksanaan Wilayah II	K	B	F
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	1	0
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama (*)(2 orang)	2	3	-1
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	2	0	2
JF Penata Kelola Bangunan Gedung Kawasan Permukiman Ahli pertama (*)(1 orang)	2	2	0
JF Penata Kelola Bangunan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda	2	0	2
Jumlah Terpenuhi/Dibutuhkan	9	6	3

No	Jumlah	Pemencanaan Kebutuhan
1	111	(K) Kebutuhan Ideal
2	83	(B) Eksisting/ Pegawai saat ini
3	28	(F) Formasi

Gambar 3. 3. Peta Jabatan BP3KP Jawa IV, Sumber: BP3KP Jawa IV, 2025.

c. Proyeksi Pegawai (2025-2029)

Berdasarkan Peta Jabatan BP3KP Jawa IV kebutuhan ideal sebanyak 111 pegawai berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja, sementara jumlah pegawai eksisting sebanyak 83 orang sehingga terdapat *gap* kekurangan 28 pegawai. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pada tahun 2025 masuk perekrutan 34 CPNS yang mayoritas berasal dari jabatan fungsional teknis, antara lain Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama, Arsiparis Ahli Pertama, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, serta Pranata Komputer Ahli Pertama. Penambahan ini secara signifikan memperbaiki rasio kecukupan pegawai pada tahun 2025.

Proyeksi ketersediaan pegawai dilakukan dengan metode *supply forecasting*, yaitu menghitung dinamika rekrutmen dan pensiun tahunan. Dengan asumsi tidak terdapat pensiun pada tahun 2025, diikuti pensiunnya 2 pegawai pada tahun 2026 dan masing-masing 1 pegawai pada tahun 2027–2029 (total 5 pegawai hingga 2029), maka diprediksi jumlah pegawai meningkat sebanyak 117 orang pada tahun 2025 dan secara bertahap akan menurun menjadi 112 orang pada akhir tahun 2029. Jika

disandingkan dengan kebutuhan ideal sebesar 111 pegawai, terdapat surplus tipis sebanyak 1 pegawai pada akhir periode.

Meskipun secara total jumlah pegawai mendekati kebutuhan ideal, keseimbangan struktural per jabatan tetap perlu diperhatikan. Penambahan 34 CPNS terkonsentrasi pada jabatan teknis tertentu, sehingga evaluasi distribusi pegawai dan peninjauan berkala terhadap Analisis Beban Kerja (ABK) tetap diperlukan guna memastikan kesesuaian antara komposisi SDM dan dinamika beban kerja organisasi selama periode perencanaan.

Tabel 3. 5. Matriks Proyeksi Jumlah Pegawai 2025–2029

Tahun	Pegawai (PNS-PPPK)	CPNS	Pensiun	Jumlah Akhir
2025	83	34	0	117
2026	117	0	2	115
2027	115	0	1	114
2028	114	0	1	113
2029	113	0	1	112

Kebutuhan ideal (ABK)= 111 pegawai

Proyeksi akhir 2029 = 112 pegawai, surplus +1 secara agregat

Tabel 3. 6. Matriks Proyeksi Jabatan 2025–2029

Jabatan	Kebutuhan Ideal (K)	Eksisting (B)	CPNS 2025	Proyeksi 2029	Analisis Awal
Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	sesuai K	sesuai B	0	B	Stabil
Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	sesuai K	sesuai B	0	B	Stabil
Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	sesuai K	B	13	B+13	Penguatan signifikan
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	sesuai K	B	0	B	Stabil
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	sesuai K	B	0	B	Stabil
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	sesuai K	B	8	B+8	Penguatan signifikan
Arsiparis Ahli Pertama	sesuai K	B	5	B+5	Mengurangi defisit
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	sesuai K	B	0	B	Stabil
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	sesuai K	B	3	B+3	Penguatan moderat
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	sesuai K	B	1	B+1	Penguatan minimal
Pranata Komputer Ahli Pertama	sesuai K	B	1	B+1	Penguatan minimal

Jabatan	Kebutuhan Ideal (K)	Eksisting (B)	CPNS 2025	Proyeksi 2029	Analisis Awal
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	sesuai K	B	0	B	Tidak berubah
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	sesuai K	B	0	B	Tidak berubah
Pengelola BMN	sesuai K	B	0	B	Tidak berubah
Pengadministrasi/Pengelola Layanan Operasional	sesuai K	B	0	B	Tidak berubah
Operator Layanan Operasional	sesuai K	B	0	B	Tidak berubah

Rekap total berdasarkan proyeksi jabatan hingga tahun 2029 sebagai berikut:

1. Kebutuhan Ideal (K) : 111 pegawai
2. Eksisting (B) : 83 pegawai
3. CPNS 2025 : 34 pegawai
4. Pensiun 2026–2029 : 5 pegawai
5. Proyeksi Total 2029 : 112 pegawai



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN JAWA IV
TAHUN 2025-2029

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV kurun waktu 5 tahun mendatang 2025-2029, diartikan target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program yang ada di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman didasarkan kepada peraturan dan target kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran.
2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Tabel 4. 1. Rekapitulasi Target Kinerja BP3KP Jawa IV 2025-2029

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN	2025-2029
Meningkatnya Hunian Layak	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	
Rekomendasi Kebijakan	13 rekomendasi kebijakan
Data dan Informasi	8 dokumen
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	23 laporan
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	6.711 unit
Dukungan Teknis	11 laporan
Kebijakan Program Anggaran dan Rencana Teknis	4 rekomendasi kebijakan
Penyediaan Rumah Layak Huni	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN	2025-2029
Pembangunan Rumah Swadaya	88.795 unit
Pembangunan Rumah Khusus	8.712 unit
Pembangunan Rumah Susun	2.156 unit
Pelaporan Dokumen Teknis	16 laporan
Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	12 rekomendasi kebijakan
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	
Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	4 rekomendasi kebijakan
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	35 hektar
Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Penyelenggaraan Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko	4 laporan
Pembangunan dan Penerapan Zona Integritas	5 rekomendasi kebijakan
Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	9 rekomendasi kebijakan
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	
Layanan Perkantoran	10 layanan
Layanan Umum	34 layanan
Layanan Sarana Internal	10 layanan
Layanan Data dan Informasi	12 layanan
Layanan BMN	8 layanan
Layanan Reformasi Kinerja	8 layanan

B. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV diperlukan dukungan kerangka pendanaan yang maksimal. Perhitungan Pendanaan perlu memperhatikan antara lain:

1. Alokasi pendanaan program adalah penjumlahan dari alokasi pendanaan kegiatan
2. Alokasi pendanaan kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi pendanaan output
3. Alokasi pendanaan output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.

Alokasi pendanaan BP3KP Jawa IV untuk periode tahun 2025-2029 bersumber dari APBN melalui DIPA 5 (lima) Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Tabel 4. 2. Rekapitulasi Kerangka Pendanaan BP3KP Jawa IV 2025-2029

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN	2025-2029 (Rp. Ribu)
Meningkatnya Hunian Layak	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	7.679.721
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	116.541.145
Penyediaan Rumah Layak Huni	10.566.826.424
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	325.187
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	75.775.000
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.589.891
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	160.254.829
TOTAL	10.930.992.196



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

PENUTUP

RENCANA STRATEGIS
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN JAWA IV
TAHUN 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dalam mengemban visi, misi dan sasaran yang harus dicapai oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara pemerinah pusat dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat umum agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pencapaian sasaran target rencana strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Tahun 2025-2029 sangat memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan rakyat. Berbagai insentif diberikan oleh Pemerintah untuk mendorong swasta dan masyarakat membangun rumah yang layak huni, baik melalui pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, maupun melalui bantuan stimulan perumahan swadaya.

Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan rumah baru layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai serta meningkatnya kepastian hukum dalam bermukim serta peningkatan kualitas perumahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan pembangunan perumahan dapat berjalan secara optimal sehingga pada akhirnya pemenuhan hunian yang layak sebagai hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih berjati diri, mandiri dan produktif.

Melalui pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Tahun 2025-2029 secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat diharapkan dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam rangka proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara *horizontal* yang semakin kuat dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan rakyat sangat diperlukan.

Guna menjamin efektivitas pelaksanaannya, proses implementasi Rencana Strategis ini akan dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme pemantauan capaian kinerja triwulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara realisasi di lapangan dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun manajerial yang muncul. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi basis data utama dalam pengambilan keputusan, perbaikan strategi operasional, serta sebagai wujud akuntabilitas publik atas kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV.

Rencana strategis ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka untuk disempurnakan, sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan strategis yang dinamis.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN JAWA IV
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN I: Matrik Kinerja dan Pendanaan BP3KP Jawa IV

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASA RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKAT OR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan																
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:																
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi															
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak																
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV																
	OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	50.000	175.000	184.450	194.410	204.908	808.769
		2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	60.000	63.240	66.655	70.254	260.149

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASA RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKAT OR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	2	-	-	-	-	2	107.317	-	-	-	-	107.317
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	32.632	34.394	36.251	38.208	141.485
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	302.167	-	-	-	-	302.167
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	369.453	389.403	410.431	432.595	1.601.882
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	153.195	161.468	170.187	179.377	664.226
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	1	2	2	2	2	9	95.075	498.045	524.939	553.286	583.164	2.254.509
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	160.000	168.640	177.747	187.345	693.731

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		penyelenggaraan perumahan perkotaan													
	10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	2	2	2	2	8	-	195.000	205.530	216.629	228.327	845.485
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	129	1.090	1.090	1.090	1.090	4.489	9.159.000	15.976.058	16.612.555	17.376.350	18.394.745	77.518.708
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	556	556	556	556	2.222	0	5.555.556	5.888.889	6.222.222	6.555.556	24.222.222
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	88.900	93.701	98.760	281.361
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	2.899.352	3.055.917	3.220.937	3.394.867	12.571.073
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	364.230	383.898	404.629	426.479	1.579.236

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASA RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKAT OR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	perumahan perdesaan													
6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	85.000	89.590	94.428	99.527	368.545
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	3.167	21.407	21.407	21.407	21.407	88.795	107.678.000	518.209.953	544.058.905	569.907.858	595.756.810	2.335.611.525
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	2.178	2.178	2.178	2.178	8.712	0	938.597.394	966.708.833	1.012.638.438	1.058.568.043	3.976.512.708
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	88	484	528	528	528	2.156	176.000.000	911.142.012	1.002.302.400	1.047.763.200	1.093.224.000	4.230.431.612
4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	88.500	93.279	98.316	103.625	383.720
5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	2	-	-	-	-	2	10.386	-	-	-	-	10.386

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASA RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKAT OR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	528.427	556.962	587.038	618.738	2.291.165
		7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	246.000	259.284	273.285	288.043	1.066.612
		8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	2.535.000	2.671.890	2.816.172	2.968.245	10.991.307
		9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	2	-	-	-	-	2	1.228.844	-	-	-	-	1.228.844
		10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508
		11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	1.843.950	1.943.523	2.048.474	2.159.091	7.995.038
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan																

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARA N KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKAT OR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan																
OUTPUT KEGIATAN:																
		1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	75.000	79.050	83.319	87.818	325.187
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu															
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh																
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																
OUTPUT KEGIATAN:																
		1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	15	20	-	-	35	-	31.575.000	44.200.000	-	-	75.775.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan															

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARA N KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKAT OR				SATUAN		TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
										2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)				(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN PROGRAM:Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																					
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman																					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman																					
OUTPUT KEGIATAN:																					
		1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	52.600	75.000	100.000	125.000	352.600					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel																					
OUTPUT KEGIATAN:																					
		1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	129.232	182.150	200.365	220.410	242.451	974.608					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																					
OUTPUT KEGIATAN:																					

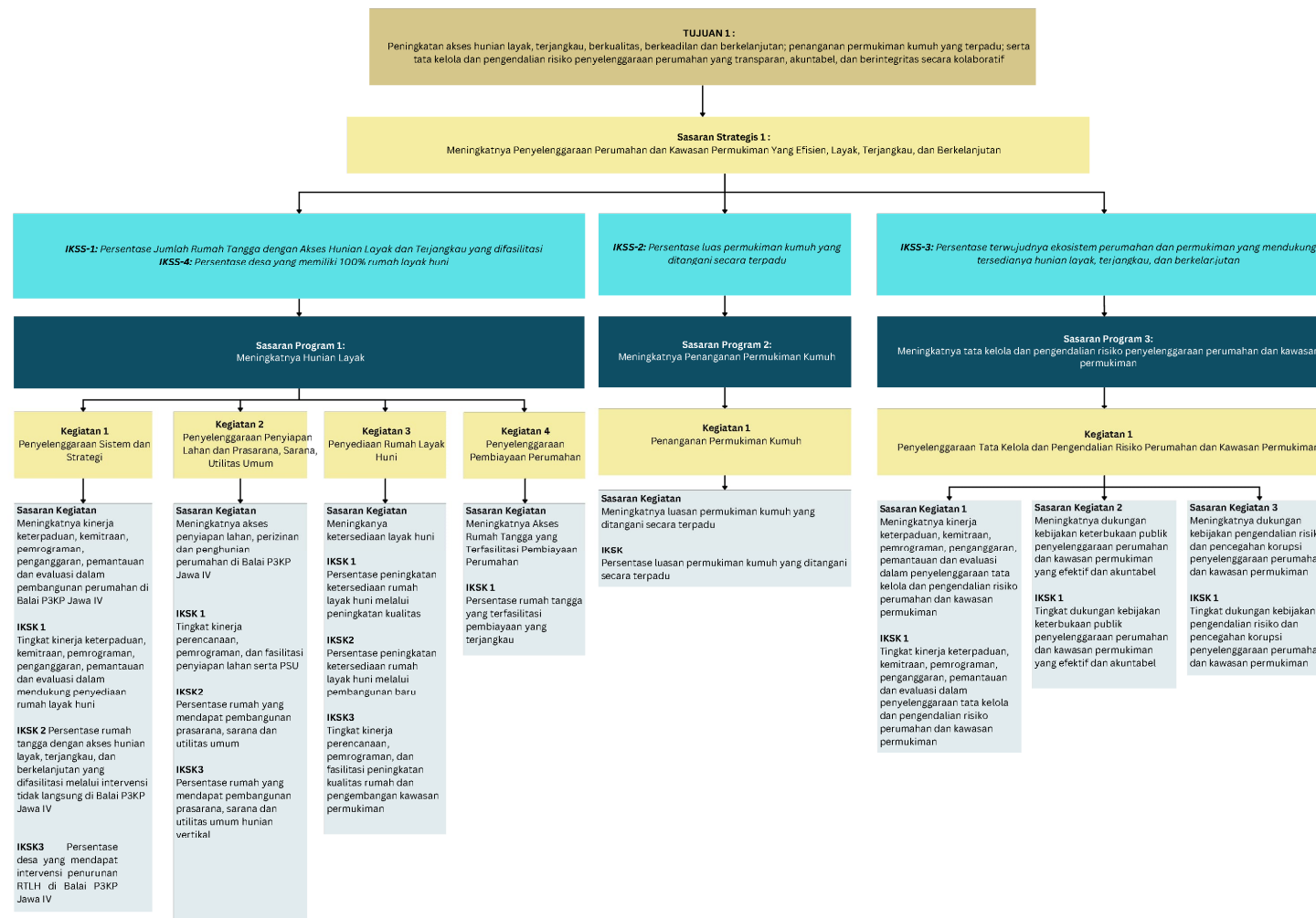
RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASA RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKAT OR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	174.233	225.000	247.500	272.250	299.475	1.218.458	
		2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	225.000	247.500	272.250	299.475	1.044.225	
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN																	
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																	
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV																	
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV																	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV																	
	OUTPUT KEGIATAN:																
		1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2	10	12.067.867	33.037.101	34.688.956	36.423.404	38.244.575	154.461.903	

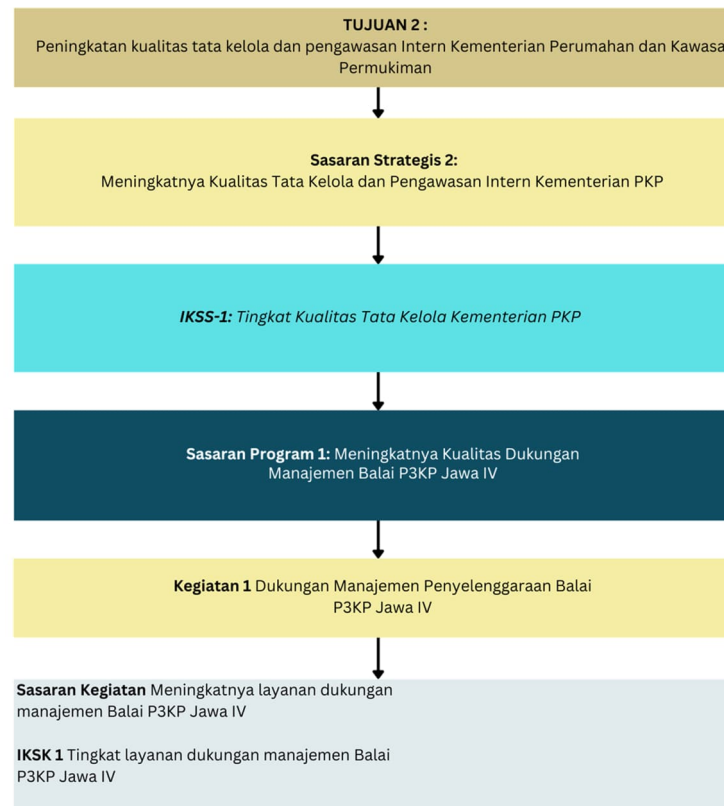
RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASA RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKAT OR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2	10	19.719	64.500	67.725	71.111	74.667	297.722
		3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	139.600	147.138	155.084	163.458	605.281
		4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	252.000	265.608	279.951	295.068	1.092.627
		5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	180.000	189.720	199.965	210.763	780.448
		6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2	10	28.419	300.894	315.939	331.736	348.322	1.325.309
		7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	15.000	15.810	16.664	17.564	65.037
		8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	14.131	14.894	15.698	16.546	61.269
		9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508
		10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	21.000	22.134	23.329	24.589	91.052
		11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508
		12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	200.000	210.800	222.183	234.181	867.164
TOTAL											307.050.258	2.466.483.732	2.627.656.369	2.704.291.289	2.825.510.549	10.930.992.196

LAMPIRAN II: Pohon Kinerja BP3KP Jawa IV



Gambar Pohon Kinerja 1. BP3KP Jawa IV-Sasaran Strategis 1



Gambar Pohon Kinerja 2. BP3KP Jawa IV-Sasaran Strategis 2

LAMPIRAN III: Metode Perhitungan BP3KP Jawa IV

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN		SUMBER DATA	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan											
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak											
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi											
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	IKSK 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan		Non Kumulatif		Internal	
				OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total : 4 dokumen		Non Kumulatif		Internal	

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2026: - laporan 2027: - laporan 2028: - laporan 2029: - laporan Total : 2 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 kegiatan 2026: - kegiatan 2027: - kegiatan 2028: - kegiatan 2029: - kegiatan Total : 1 kegiatan	Non Kumulatif	Internal
				OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2026: 2 laporan 2027: 2 laporan 2028: 2 laporan 2029: 2 laporan Total : 9 laporan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2026: 2 laporan 2027: 2 laporan 2028: 2 laporan 2029: 2 laporan Total : 8 laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	IKSK 1	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 129 unit 2026: 1.090 unit 2027: 1.090 unit 2028: 1.090 unit 2029: 1.090 unit Total : 4.489 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 556 unit 2029: 556 unit 2026: 556 unit 2028: 556 unit Total : 2.222 unit	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	OK 3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2026: - dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total : 3 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni								

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
SK 1	Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1	Jumlah unit rumah swadaya <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3.167 unit 2026: 21.407 unit 2027: 21.407 unit 2028: 21.407 unit 2029: 21.407 unit Total : 88.795 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2026: 2.178 unit 2027: 2.178 unit 2028: 2.178 unit 2029: 2.178 unit Total : 8.712 unit	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 88 unit 2027: 528 unit 2029: 528 unit 2026: 484 unit 2028: 528 unit Total : 2.156 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2026: - laporan 2027: - laporan 2028: - laporan 2029: - laporan Total : 2 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2026: - laporan 2027: - laporan 2028: - laporan 2029: - laporan Total : 2 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 4: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan								
SK 1	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	IKSK 1	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau	OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh								
Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh								

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: - Ha 2026: 15 Ha 2027: 20 Ha 2028: - Ha 2029: - Ha Total: 35 Ha	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV mulai tahun 2026 Capaian = Realisasi laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total: 4 Laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel								

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
SK 1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	IKSK 1	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	OK 1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
SK 1	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 1	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Dihitung dari realisasi jumlah penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyupaan	Dihitung dari realisasi jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyupaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyupaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN								
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV								
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV								
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	IKSK 1	Tingkat layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total : 10 layanan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 2	Jumlah Layanan Umum(Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total : 10 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total : 8 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total : 8 layanan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 5	Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total : 8 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total : 10 layanan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 1 layanan 2027: 1 layanan 2028: 1 layanan 2029: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Perumahan Perdesaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 1 layanan 2027: 1 layanan 2028: 1 layanan 2029: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 1 layanan 2027: 1 layanan 2028: 1 layanan 2029: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 10	Jumlah Layanan BMN <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 1 layanan 2027: 1 layanan 2028: 1 layanan 2029: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 11	Jumlah Layanan BMN <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 1 layanan 2027: 1 layanan 2028: 1 layanan 2029: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal

RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
				OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total : 8 layanan	Non Kumulatif	Internal